

DOKUMEN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan	Perbandingan antara perkara yang diterima dan jumlah perkara yang diputus	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara Sisa tahun sebelumnya dengan jumlah perkara yang diputus	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Jumlah berkas yang deregister dan siap disidangkan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang disidangkan	Panitera /Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasidan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasidan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.	Panitera /Sekretaris	Laporan Bulanan
		c. Jumlah Penyampaian	Perbandingan antara persidangan dengan	Jurusita	Laporan Bulanan

		pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	pemanggilan	Pengganti	
		d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan/Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	Perbandingan antara putusan dan pemberitahuan putusan	Jurusita Pengganti	Laporan Bulanan
		e. Jumlah eksekusi tepat waktu	Perbandingan antara permohonan Eksekusi dengan Eksekusi	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.

			b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentas epengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanandan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanandan Laporan Tahunan.

5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Program dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya	a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan system akuntansi pemerintah (SAP)	Perbandingan penyelesaian laporan pelaksanaan anggaran sesuai standar.	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Optimalisasi penyerapan anggaran	Perbandingan Prosentase Anggaran yang tersedia dengan Realisasi anggaran	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
7.	Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan	Prosentase sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
8.	Program Peningkatan Manageman Peradilan Militerdan TUN	Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan peradilan TUN	Jumlah perkara prodeo yang diterima berdasarkan jumlah dana yang tersedia	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYATAHUN 2015 -2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	14 Perkara	11Perkara	17 Perkara	25 Perkara	30 Perkara
		b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	7Perkara	1Perkara	2 Perkara	4 Perkara	5 Perkara
2.	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Jumlah berkas yang deregister dan siap disidangkan ke Majelis	14 Perkara	11 Perkara	17 Perkara	25 Perkara	30 Perkara
		b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasidan PK yang disampaikan secara lengkap	30 Perkara	30 Perkara	30 Perkara	30 Perkara	30 Perkara
		c. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	14Perkara	11Perkara	17 Perkara	25 Perkara	30 Perkara
		d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan / Penetapan TepatWaktu, Tempat dan Para Pihak	14Perkara	11Perkara	17 Perkara	25 Perkara	30 Perkara

		e. Jumlah eksekusi tepat waktu	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
4.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access To Justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan system akuntansi pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Optimalnya penyerapan anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

7.	Program Peningkatan Sarana Dan Pra-Sarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana aparaturn pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Program Peningkatan Manageman Peradilan Militer Dan TUN	Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan peradilan TUN	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara

Palangkaraya, September 2017
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Ketua,

SETYOBUDI, SH., MH
NIP. 19630625 199203 1 002